



**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2022 LAPORAN KINERJA

**KANTOR IMIGRASI
KELAS II TPI SINGKAWANG**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



<http://kanimsingkawang.kemenkumham.go.id/>



“Mari Bersama-sama merapatkan barisan untuk menyongsong tahun 2022 dengan penuh optimis.

Bersama kita PASTI menghadapi seluruh tantangan di masa yang akan datang dan mewujudkan Kemenkumham yang lebih PASTI!...”

Menteri Hukum dan HAM RI

Yasonna H. Laoly

Alamat Kami :

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kantor Wilayah Kalimantan Barat
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang**

**Jalan Firdaus H. Rais A. Rachman No.31, Pasiran,
Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang,
Kalimantan Barat 79122**

**Telepon : (0562) 631946, Faksimile : (0562) 633445
Laman: <http://kanimsingkawang.kemenkumham.go.id/>,
Surel: knm.singkawang@kemenkumham.go.id**



DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
EXECUTIVE SUMMARY	4
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang Tahun 2022. Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.

Singkawang, 08 Februari 2023
Kepala Kantor,

Muzayal Zam
NIP. 196904281993031001



EXECUTIVE SUMMARY **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Sasaran SAKIP adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif serta responsif terhadap kebutuhan dan isu strategis yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan. Terwujudnya transparansi dalam penggunaan APBN merupakan tonggak utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, untuk itulah LKIP disusun secara tepat, jelas, dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pemerintah. Dengan dilaksanakannya SAKIP secara tepat dan bersinergis maka diharapkan terdapat peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintah.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang sebagai salah satu satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Barat, memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Secara umum capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang pada tahun 2022 telah tercapai dengan baik.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang tahun 2022 mencapai 97,89% atau sebesar Rp.8.817.320.502,- dari total anggaran sebesar Rp.9.007.807.000,- . Penyerapan tersebut sudah optimal mengingat target penyerapan yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal pada triwulan IV sebesar 100% sehingga deviasi penyerapan hanya sebesar 2,11%. Walaupun capaian kinerja dari aspek serapan anggaran belum mencapai 100%, namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan dan seluruh program kegiatan dapat terlaksana maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang sudah berjalan dengan baik dan efisien.



**#bangga
melayani
bangsa**

KAMI ASN KEMENKUMHAM
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H
Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI

➤ **Berorientasi Pelayanan**

1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
3. Melakukan perbaikan tiada henti.

➤ **Akuntabel**

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

➤ **Kompeten**

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2. Membantu orang lain belajar;
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

➤ **Harmonis**

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2. Suka menolong orang lain;
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

➤ **Loyal**

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
3. Menjaga rahasia jabatan dan negara.

➤ **Adaptif**

1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
3. Bertindak proaktif.

➤ **Kolaboratif**

1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan melaksanakan pembangunan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.



B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Pasal 1 menyebutkan bahwa Kedudukan Kantor Imigrasi adalah :

1. Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut dengan Kanim adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
2. Kanim dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kanim mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kanim menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
 - b. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
 - c. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
 - d. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
 - e. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
 - f. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;

- g. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- h. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
- i. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Susunan organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang terdiri atas 1 (satu) Subbagian dan 3 (tiga) Seksi, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi

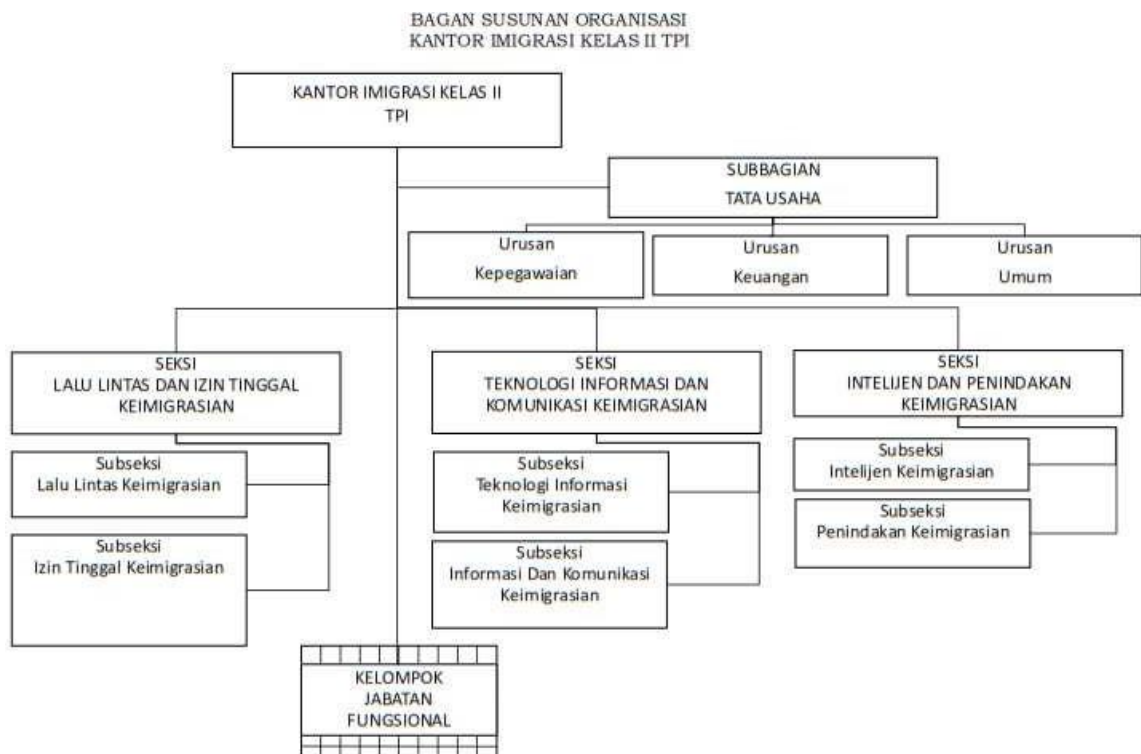
1. Subbagian Tata Usaha	
Tugas	Fungsi
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.	a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan dan pengendalian internal; c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.
2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	
Tugas	Fungsi
Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.	a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian; b. pelayanan paspor; c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing; d. pelayanan pas lintas batas; e. pelayanan izin tinggal; f. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian; g. pelayanan izin masuk kembali; h. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; i. pelayanan surat keterangan keimigrasian; j. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda; k. pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian; l. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan m. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	
Tugas	Fungsi
Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.	a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian; c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.
4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	
Tugas	Fungsi
Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.	a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian; c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian; d. penyajian informasi produk intelijen; e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian; f. penyidikan tindak pidana keimigrasian; g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Keempat Subbagian/Seksi tersebut diatas dibagi menjadi 3 (tiga) Urusan dan 6 (enam) Subseksi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Urusan Kepegawaian;
 - b. Urusan Keuangan; dan
 - c. Urusan Umum.
2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:
 - a. Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian; dan
 - b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian.
3. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri atas:
 - a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan
 - b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.
4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:
 - a. Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan
 - b. Subseksi Penindakan Keimigrasian.

Struktur organisasi Kantor Imigrasi, sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang per tanggal 31 Desember 2022 menunjukkan terdapat 81 pegawai. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang

KANTOR	JUMLAH PEGAWAI				PENDIDIKAN														TOTAL	PEJABAT TEKNIS	
					SD		SMP		SMA		D3		S1		S2		S3				
	I	II	III	IV	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L		P	
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG	-	49	30	2	-	-	-	-	44	5	4	3	15	3	2	2	-	-	81	7	1
JUMLAH	-	49	30	2	-	-	-	-	44	5	4	3	15	3	2	2	-	-	81	7	1

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang menyusun Laporan Kinerja T.A 2022 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini juga disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan Informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi penilaian kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang;
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang secara berkelanjutan.

D. Isu Strategis

Terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang, antara lain:

Tabel 3. Isu Strategis/ Permasalahan

No.	Isu Strategis/ Permasalahan
Subbagian Tata Usaha	
1	Administrasi Kepegawaian - Masih kurangnya pemahaman JFU terhadap jurnal harian dan SKP; - Masih adanya JFU yang belum mengisi jurnal harian; - Masih kurangnya pejabat Eselon yaitu Kasubsi Komunikasi, Kasubsi Informasi.
2	Administrasi Keuangan - Untuk Belanja Modal (53) : pekerjaan rehabilitasi kantor (ruang pelayanan) masih dalam tahap pengerjaan.
3	Administrasi Umum - Terbangkalainya Pos Lintas Batas Saperan dikarenakan tidak lagi operasional.
Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	
1	Masih kurangnya sarana prasarana pendukung cetak paspor seperti : mesin scan paspor sehingga pelayanan kurang maksimal.
2	Seringnya jaringan sistem paspor yang kurang maksimal/sering trouble di dalam pelayanan DPRI.
Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian	
1	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan aplikasi antrian online (M-Paspor).
2	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan aplikasi pengawasan orang asing (APOA).
Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	
1	Kurangnya Pejabat Imigrasi (PPNS) dalam melaksanakan tugas Pengawasan, Penyidikan hingga Penyidik mengakibatkan lambatnya proses pekerjaan khususnya kasus besar terkait proses penyidikan dan pekerjaan tidak tepat waktu.
2	Luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dan letak geografis yang bersebelahan dengan Malaysia memungkinkan adanya kerawanan terhadap peraturan keimigrasian.

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.

C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.

D. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

E. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan atau sasaran strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja Organisasi setiap indikator yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisa capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja serta perbandingan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja anggaran yang dihasilkan oleh dua variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

D. Capaian Kinerja Lainnya

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja yang dihasilkan dari aplikasi E-Performance Kementerian Hukum dan HAM, Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM, E- Monev Bappenas serta Kegiatan Prioritas Nasional.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

B. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah "*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*".

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

- a. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
- d. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan

- e. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah: *"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*.

2. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 (enam) yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 (tujuh) yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 (delapan) yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
- c. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
- e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan; dan
- g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik.

Sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, maka Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
 - c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
 - d. Terlindunginya hak asasi manusia;
 - e. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
 - f. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
 - g. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Tata Nilai
- a. Tata Nilai PASTI

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

- 1) Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;

- 2) Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
- 3) Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
- 4) Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

b. Tata Nilai *Core Values* ASN BerAKHLAK

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN:

- 1) Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
- 2) Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- 3) Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- 4) Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- 5) Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- 6) Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.

- 7) Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

5. Sasaran Strategis

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka disusun sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024, terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis dengan 21 Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM yakni:

- Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
- Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di Bidang Hukum dan HAM;
- Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

6. Upaya Pencapaian Kinerja

Dalam rangka upaya pemenuhan target capaian kinerja, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang melaksanakan beberapa upaya/strategi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi selama tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4. Upaya Penyelesaian Isu Strategis/Permasalahan

No.	Upaya Penyelesaian Isu Strategis/ Permasalahan
Subbagian Tata Usaha	
1	Administrasi Kepegawaian - Perlunya sosialisasi mengenai pentingnya jurnal harian dan SKP; - Perlunya sosialisasi mengenai bagaimana cara mengisi jurnal harian; - Perlu segera adanya pengisian jabatan Eselon V yang masih kosong.
2	Administrasi Keuangan - Melaksanakan kegiatan tepat waktu dan sasaran; - Melakukan koordinasi dengan pelaksana pekerjaan rehab gedung dan bangunan, tim pengelola teknis dan pengelola keuangan.

3	Administrasi Umum
	- Melakukan pemeliharaan dan menghimbau pengguna kendaraan dinas untuk merawat/menggunakan dengan baik; - Melakukan pemeliharaan dan menghimbau pengguna rumah dinas untuk merawat/menggunakan dengan baik.
Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	
1	Mengajukan pengadaan sarana prasarana pendukung cetak paspor seperti : mesin scan paspor sehingga pelayanan dapat dilakukan maksimal.
2	Berkoordinasi dengan Direktorat Sistem dan Teknologi mengenai jaringan sistem paspor yang kurang maksimal/sering trouble di dalam pelayanan DPR1 dan peningkatan bandwitch.
3	Perlunya sosialisasi kepada pemohon dalam menggunakan aplikasi antrian online.
Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian	
1	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi antrian online.
2	Melakukan sosialisasi kepada hotel/penginapan/kost-kostan untuk mengisi aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) secara tepat waktu.
Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	
1	Perlunya JFU mengikuti bimbingan teknis agar dapat memahami Administrasi Pemeriksaan, Intelijen dan Pemantauan mengakibatkan terbatasnya Personil yang mampu dalam bidang Teknik Interogasi, Wawancara, Elisitasi sehingga proses penyelidikan dan penindakan pelanggaran Hukum Keimigrasian tidak membutuhkan waktu lama.
2	Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendapatkan Perangkat /kumpulan Aturan tentang Keimigrasian dan Aturan pendukung lainnya yang up to date sehingga Petugas dapat mengikuti perkembangan perangkat aturan yang terbaru, sehingga tidak lagi menghambat operasionalisasi tugas pengawasan, penyidikan dan penindakan;
3	Mengusulkan pejabat imigrasi untuk mengikuti Diklat PPNS dalam melaksanakan tugas Pengawasan, dan Penyidikan.
4	Optimalisasi Timpora sampai ketingkat desa/kecamatan sehingga tingkat kerawanan terhadap pelanggaran peraturan keimigrasian dapat diminimalisir.

B. Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2022, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang memperoleh anggaran sebesar Rp. 9.007.807.000,- (Sembilan Milyar Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dengan pengalokasian pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 indeks	Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.634.804.000
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 indeks		
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 indeks	Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.373.003.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program/kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja, sehingga dapat menunjukkan *impact/outcome* dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang diukur berdasarkan 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Terdapat kolom Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Target, Capaian, Analisis, Kendala/Isu Strategis, Strategi, dan Analisis Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya. Terkait indikator capaian kinerja serta analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Target	Kendala / Isu Strategis	Strategi Pencapaian Tahun Berjalan dan Strategi Pencapaian Tahun Berikutnya	Analisis Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 indeks	3,93 indeks (123%)	Keberhasilan capaian target Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dapat melebihi target yang ditetapkan karena Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dapat memberikan	Masih terdapat masyarakat yang tingkat pemahamannya masih rendah terhadap kebijakan maupun inovasi yang diimplementasikan	1. Sehingga memerlukan sosialisasi dan pendekatan guna menghindari munculnya tanggapan negatif terhadap pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang meningkat

					pelayanan prima kepada masyarakat sehingga indeks kepuasan masyarakat meningkat.	pada pelayanan keimigrasian	keimigrasian yang dapat menurunkan citra positif Imigrasi di mata masyarakat. 2. Melakukan evaluasi hasil kegiatan tahun berjalan dan persiapan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.	disebabkan oleh adanya kebijakan penggunaan aplikasi mobile paspor yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, yang memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi, selain itu berbagai aplikasi online yang diluncurkan, dapat memudahkan masyarakat yang memerlukan pelayanan keimigrasian.
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 indeks	3,84 indeks (123%)	Keberhasilan capaian target Indeks Pengamanan Keimigrasian yang diperoleh dapat melebihi target yang ditetapkan karena Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang bekerja secara profesional dengan menerapkan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan.	Aturan dan kebijakan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian sering mengalami perubahan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga diperlukan internalisasi agar penerapan aturan dan kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik.	Melaksanakan kegiatan internalisasi terhadap peraturan dan kebijakan teknis, agar seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dapat memahami sehingga dapat menerapkan aturan dan kebijakan tersebut dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.	Tahun 2021, nilai indeks yang diperoleh sebesar 3,84 indeks sehingga pada tahun ini Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah meningkat.

2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 indeks	3,96 indeks (127%)	Keberhasilan capaian target Indeks Kepuasan Internal yang diperoleh dapat melebihi target yang ditetapkan karena komitmen Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang untuk bekerja secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.	Perlu lebih sering melakukan internalisasi agar seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dapat menerapkan nilai Pasti dan berakhlak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari.	Melaksanakan kegiatan internalisasi reformasi birokrasi dan mempertahankan zona integritas pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang agar semakin Pasti dan Berakhlak dalam mempertahankan WBK/WBBM.	Untuk tahun 2022, nilai indeks yang diperoleh sebesar 3,96 Hal tersebut dikarenakan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang menjadi lebih baik dikarenakan internalisasi dan penerapan nilai Pasti kepada seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang gencar dilaksanakan sebagai upaya untuk mempertahankan zona integritas menuju WBK/WBBM.
---	--	-------------------------------------	-------------	--------------------	---	--	---	---

B. Realisasi Anggaran

Ditampilkan matriks yang berisi Sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan, Alokasi Anggaran, dan Realisasi Anggaran. Serapan anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang telah mencapai dan melebihi target serapan pada Triwulan IV yaitu >95%. Berikut ditampilkan tabel realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang pada tahun 2022.

Tabel 7. Realisasi Anggaran

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Analisis Penggunaan Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	A. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 indeks	3,93 indeks (123%)	1,634,804,000	1,507,197,120	Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar 92,19%, dan untuk realisasi sudah sangat baik, hal tersebut dikarenakan pandemi covid sudah mulai mereda sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal.
		B. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 indeks	3,84 indeks (123%)			
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 indeks	3,96 indeks (127%)	7,373,003,000	7,310,123,374	Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar 99,15%, dan untuk realisasi sudah sangat baik.

C. Capaian Kinerja Anggaran

1. Capaian Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA

Data capaian kinerja anggaran pada aplikasi SMART DJA bersumber dari website aplikasi <https://smart.kemenkeu.go.id/>. Pengisian data pada aplikasi SMART DJA dilakukan setiap bulan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat selalu melakukan monitoring untuk melakukan pengisian Realisasi Volume RO pada bulan berjalan dengan batas akhir pada tanggal 05 bulan berikutnya. Untuk perhitungan pada aplikasi SMART DJA menggunakan dasar aturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 8. Capaian Kinerja Anggara pada Aplikasi SMART DJA

No.	Nama Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang	97,63	97,89	98,83	100	17,26	93,16

2. Capaian Kinerja Anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Ditampilkan data IKPA pada Satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat per tanggal 05 Januari 2023. Sumber data diperoleh dari Subbag Pengelola Keuangan dan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Untuk perhitungan nilai akhir menggunakan rumus:

$$\text{Nilai IKPA} = \frac{\text{Rerata Kualitas Perencanaan Anggaran} + \text{Rerata Kualitas Pelaksanaan Anggaran} + \text{Rerata Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran}}{3}$$

Tabel 9. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN											
*Data ditarik tanggal 5 Januari 2023											
No	Kode Satker	Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
1	409139	BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK	100	62,43	73,17	80,00	100	97,21	100	100	88,60

2	632031	BALAI PEMASYARAKATAN SAMBAS	100	66,38	90,06	100,00	100	99,67	100	100	94,62
3	622441	BALAI PEMASYARAKATAN SINTANG	100	63,38	99,62	0	0	100	100	100	95,33
4	408171	KANIM KELAS I PONTIANAK	100	85,03	88	89,73	100	100	100	100	95,06
5	539101	KANIM KELAS II ENTIKONG	100	94,93	100	95	100	99,73	100	100	98,97
6	662967	KANIM KELAS II SAMBAS	100	83,84	99	98	100	99,45	100	100	97,97
7	409145	KANIM KELAS II SANGGAU	100	75,47	99,69	100	100	100	100	100	97,49
8	408190	KANIM KELAS II SINGKAWANG	100	81,76	95,33	87,14	100	97,55	100	100	95,71
9	418936	KANIM KELAS III KETAPANG	100	77,19	98,92	93,25	100	98,67	100	100	96,70
10	686574	KANIM KELAS III PUTUSSIBAU	100	92,7	94,01	91	100	99,92	100	100	97,16
11	408840	KANTOR WILAYAH (BALITBANG HAM)	100	76,63	100	0	0	84,60	100	100	95,15
12	408839	KANTOR WILAYAH (BPHN)	100	78,50	99,4	0	0	88,25	100	100	95,69
13	408833	KANTOR WILAYAH (DITJEN AHU)	100	100	99,59	100	100	0	100	100	99,91
14	408836	KANTOR WILAYAH (DITJEN HAKI)	100	100	99,26	0	0	0	100	100	99,79
15	408835	KANTOR WILAYAH (DITJEN IMIGRASI)	100	84,21	90,88	0	0	0	100	100	95,14
16	408834	KANTOR WILAYAH (DITJEN PEMASYARAKATAN)	100	77,87	93,44	0	0	93,61	100	100	94,79
17	408838	KANTOR WILAYAH (DITJEN PERLINDUNGAN HAM)	100	79,33	87,24	0	0	95,56	100	100	93,67
18	408837	KANTOR WILAYAH (DITJEN PP)	100	63,53	100	0	0	95,82	100	100	94,92
19	408830	KANTOR WILAYAH (SEKJEN)	100	89,17	100,00	100,00	100	95,55	100	100	98,47
20	418336	LAPAS PEREMPUAN PONTIANAK	100	81,03	99,49	71,43	100	97,59	100	100	94,90
21	406664	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KETAPANG	100	90,14	100	100,00	100	99,56	100	100	98,97
22	406602	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PONTIANAK	100	91,24	99,45	83,81	100	99,35	100	100	97,33
23	406627	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGKAWANG	100	94,71	100	100	100	99,80	100	100	99,45
24	406658	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINTANG	100	100	97,98	100	100	100	100	100	99,60
25	406673	LPKA SUNGAI RAYA	100	83,68	99,56	71,43	100	99,95	100	100	95,42
26	664650	RUDENIM PONTIANAK	100	76,65	99,22	91,00	100	100	100	100	96,60
27	497789	RUMAH TAHANAN BENGKAYANG	100	75,92	100	71,43	92,31	96,74	100	100	93,64
28	497773	RUMAH TAHANAN NEGARA LANDAK	100	70,76	100	100	100	99,88	100	100	97,06
29	406633	RUMAH TAHANAN NEGARA MEMPAWAH	100	75,02	100	85,71	100	92,50	100	100	95,32
30	406642	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMBAS	100	88,36	89,76	100	100	100	100	100	96,79
31	406611	RUMAH TAHANAN NEGARA SANGGAU	100	94,19	98,17	100	100	100,00	100	100	99,05
32	567873	RUMAH TAHANAN PONTIANAK	100	91,44	98,42	81,43	100	98,31	100	100	96,80
33	526822	RUMAH TAHANAN PUTUSSIBAU	100	83,83	93,90	80,00	100	85,03	100	100	93,67
34	632637	RUPBASAN PONTIANAK	100	85,44	100	0	100	100	100	100	88,54
35	653403	RUPBASAN SANGGAU	100	78,81	100	0	0	99,87	100	100	97,34
36	653395	RUPBASAN SINGKAWANG	100	67,26	98,89	100	100	99,28	100	100	96,43
RATA-RATA NILAI IKPA			100	82,25	96,74	91,17	99,72	89,26	100,00	100	96,17

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang Tahun 2022 ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Perubahan Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.06.OT.01.01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 - 2024.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan organisasi dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik penetapan ukuran maupun kinerja diupayakan ditetapkan secara lebih progresif dan menantang dalam pencapaian sasaran strategis organisasi sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud.

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik secara umum menunjukkan target kinerja tahun 2022 telah tercapai. Memasuki masa transisi pandemi menuju masa endemik covid-19 menjadi sebuah kesempatan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang untuk mempertajam peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas, serta produktivitas dalam berkinerja.

B. Saran

Untuk perbaikan di masa yang akan datang perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan yang masih belum menunjang pencapaian sasaran kegiatan, harus dilakukan penyusunan

- penyesuaian strategi pencapaian sehingga kinerja organisasi dapat lebih efektif dan terukur;
2. Meningkatkan pemantauan dan pemanfaatan aplikasi e-performance terutama pada proses berlangsungnya pencapaian kinerja;
 3. Peningkatan koordinasi diantara seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat serta melakukan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
 4. Melakukan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengelolaan SDM secara efektif dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang Tahun 2022 ini disusun dan disajikan. Semoga ke depan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya Kementerian Hukum dan HAM RI dan bagi bangsa dan negara.





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azriyal Zam

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Pamuji Raharja.

Jabatan : Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 28 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Imigrasi
Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Pamuji Raharja
NIP. 19670122 199103 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Singkawang

Azriyal Zam
NIP. 19690428 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG
DENGAN KEPALA DIVISI IMIGRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 5.710.882.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 5.710.882.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.915.023.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.915.023.000,-

Singkawang, 28 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Imigrasi
Kantor Wilayah Kalimantan Barat



Pamuji Raharja
NIP. 19670122 199103 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Singkawang



Azriyal Zam
NIP. 19690428 199303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azriyal Zam
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Singkawang, 28 Januari 2022

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Singkawang

Azriyal Zam
NIP. 19690428 199303 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEJABAT STRUKTURAL KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erwin Puji Rohati
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya Disebut **Pihak Pertama**

Nama : Azriyal Zam
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang

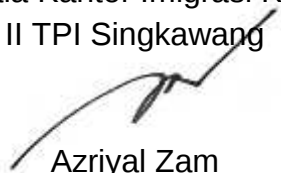
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

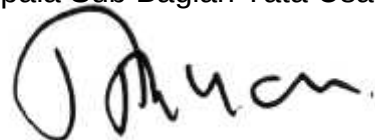
Singkawang, 21 Februari 2022

Pihak Kedua
Kepala Kantor Imigrasi Kelas
II TPI Singkawang



Azriyal Zam
NIP. 196904281993031001

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Erwin Puji Rohati
NIP. 196410031986032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PEJABAT STRUKTURAL KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG DENGAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 5.710.882.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 5.710.882.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.915.023.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.915.023.000,-

Singkawang, 21 Februari 2022

Pihak Kedua

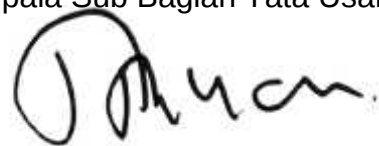
Kepala Kantor Imigrasi Kelas
II TPI Singkawang



Azriyal Zam
NIP. 196904281993031001

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Erwin Puji Rohati
NIP. 196410031986032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEJABAT STRUKTURAL KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erwin Puji Rohati
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Singkawang, 21 Februari 2022

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Erwin Puji Rohati
NIP. 196410031986032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEJABAT STRUKTURAL KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarwono

Jabatan : Kepala Seksi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian

Selanjutnya Disebut **Pihak Pertama**

Nama : Azriyal Zam

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 21 Februari 2022

Pihak Kedua

Kepala Kantor Imigrasi Kelas
II TPI Singkawang

Azriyal Zam
NIP. 196904281993031001

Pihak Pertama

Kepala Seksi Teknologi Informasi
Dan Komunikasi Keimigrasian

Sarwoho
NIP. 197302011994031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PEJABAT STRUKTURAL KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG DENGAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 5.710.882.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 5.710.882.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.915.023.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.915.023.000,-

Singkawang, 21 Februari 2022

Pihak Kedua

Kepala Kantor Imigrasi Kelas
II TPI Singkawang



Azriyal Zam
NIP. 196904281993031001

Pihak Pertama

Kepala Seksi Teknologi Informasi
Dan Komunikasi Keimigrasian



Sarwonb
NIP. 197302011994031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEJABAT STRUKTURAL KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarwono

Jabatan : Kepala Seksi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Singkawang, 21 Februari 2022

Pihak Pertama

Kepala Seksi Teknologi Informasi
Dan Komunikasi Keimigrasian

Sarwono

NIP. 197302011994031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEJABAT STRUKTURAL KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ervan Lesmana
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian
Selanjutnya Disebut **Pihak Pertama**
Nama : Azriyal Zam
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 21 Februari 2022

Pihak Kedua
Kepala Kantor Imigrasi Kelas
II TPI Singkawang

Azriyal Zam
NIP. 196904281993031001

Pihak Pertama
Kepala Seksi Intelijen Dan
Penindakan Keimigrasian

Muhammad Ervan Lesmana
NIP. 198007092001121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PEJABAT STRUKTURAL KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG DENGAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 5.710.882.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 5.710.882.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.915.023.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.915.023.000,-

Singkawang, 21 Februari 2022

Pihak Kedua

Kepala Kantor Imigrasi Kelas
II TPI Singkawang



Azriyal Zam
NIP. 196904281993031001

Pihak Pertama

Kepala Seksi Intelijen Dan
Penindakan Keimigrasian



Muhammad Ervan Lesmana
NIP. 198007092001121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEJABAT STRUKTURAL KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ervan Lesmana

Jabatan : Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Singkawang, 21 Februari 2022

Pihak Pertama

Kepala Seksi Intelijen Dan
Penindakan Keimigrasian

Muhammad Ervan Lesmana
NIP. 198007092001121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEJABAT STRUKTURAL KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heri Martono

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Izin Tinggal Keimigrasian

Selanjutnya Disebut **Pihak Pertama**

Nama : Azriyal Zam

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 21 Februari 2022

Pihak Pertama
Kepala Kantor Imigrasi Kelas
II TPI Singkawang


Azriyal Zam
NIP. 196904281993031001

Pihak Kedua
Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Izin
Tinggal Keimigrasian


Heri Martono
NIP. 198412062006041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PEJABAT STRUKTURAL KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG DENGAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 5.710.882.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 5.710.882.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.915.023.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.915.023.000,-

Singkawang, 21 Februari 2022

Pihak Kedua

Kepala Kantor Imigrasi Kelas
II TPI Singkawang


Azriyal Zam

NIP. 196904281993031001

Pihak Pertama

Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Izin
Tinggal Keimigrasian


Heri Martono

NIP. 198412062006041001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEJABAT STRUKTURAL KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heri Martono

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Izin Tinggal Keimigrasian

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Singkawang, 21 Februari 2022

Pihak Pertama
Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Izin
Tinggal Keimigrasian

Heri Martono
NIP. 198412062006041001

TABEL REALISASI ANGGARAN BELANJA TOTAL (PENYERAPAN TERBESAR - TERKECIL)
31 DESEMBER 2022

KANWIL : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT

NO	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	TOTAL BELANJA				
				PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%	
1	01	408830	KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR / Divisi Administrasi	18,347,158,000	18,377,493,004	-	30,335,004	100.17%
2	06	408837	KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR / Ditjen PP	300,000,000	299,926,250		73,750	99.98%
3	05	408840	KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR / Balitbang HAM	116,103,000	116,058,190		44,810	99.96%
4	05	406633	RUMAH TAHANAN NEGARA MEMPAWAH	8,880,908,000	8,872,568,107		8,339,893	99.91%
5	06	408838	KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR / Ditjen HAM	232,382,000	232,150,223		231,777	99.90%
6	10	408839	KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR / BPHN	634,305,000	632,281,347		2,023,653	99.68%
7	05	408833	KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR / Ditjen AHU	2,110,159,000	2,101,293,646		8,865,354	99.58%
8	05	406611	RUMAH TAHANAN NEGARA SANGGAU	7,780,035,000	7,746,975,429		33,059,571	99.58%
9	05	406627	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGKAWANG	11,407,079,000	11,351,065,979		56,013,021	99.51%
10	06	662967	KANIM KELAS II SAMBAS	8,706,946,000	8,656,996,219		49,949,781	99.43%
11	05	653395	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SINGKAWANG	2,145,651,000	2,132,656,493		12,994,507	99.39%
12	03	408836	KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR / Ditjen KI	1,039,235,000	1,032,718,158		6,516,842	99.37%
13	05	408835	KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR / Divisi Imigrasi	2,499,179,000	2,472,989,382		26,189,618	98.95%
14	05	567873	RUMAH TAHANAN NEGARA PONTIANAK	16,130,192,000	15,954,888,004		175,303,996	98.91%
15	05	406642	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMBAS	6,461,885,000	6,378,170,381		83,714,619	98.70%
16	05	406664	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KETAPANG	16,357,625,000	16,125,655,122		231,969,878	98.58%
17	05	406658	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINTANG	9,709,380,000	9,569,652,389		139,727,611	98.56%
18	09	408834	KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR / Divisi Pemasarakatan	912,948,000	899,278,111		13,669,889	98.50%
19	08	406602	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PONTIANAK	18,498,909,000	18,217,469,275		281,439,725	98.48%
20	06	408190	KANIM KELAS II SINGKAWANG	9,007,807,000	8,817,320,494		190,486,506	97.89%
21	06	664650	RUDENIM PONTIANAK	7,892,322,000	7,720,136,623		172,185,377	97.82%
22	06	526822	RUMAH TAHANAN NEGARA PUTUSIBAU	4,557,068,000	4,452,085,331		104,982,669	97.70%
23	06	539101	KANIM KELAS II ENTIKONG	8,162,937,000	7,969,147,623		193,789,377	97.63%
24	05	632637	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PONTIANAK	3,257,803,000	3,176,825,792		80,977,208	97.51%
25	05	497773	RUMAH TAHANAN NEGARA LANDAK	5,561,611,000	5,423,182,342		138,428,658	97.51%
26	05	418336	LAPAS PEREMPUAN PONTIANAK	7,715,539,000	7,522,954,287		192,584,713	97.50%
27	05	418936	KANIM KELAS III KETAPANG	7,366,710,000	7,156,966,466		209,743,534	97.15%
28	06	408171	KANIM KELAS I PONTIANAK	16,451,226,000	15,968,274,986		482,951,014	97.06%
29	05	653403	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SANGGAU	1,766,276,000	1,713,562,399		52,713,601	97.02%
30	07	622441	BALAI PEMASYARAKATAN SINTANG	3,130,436,000	3,029,522,351		100,913,649	96.78%
31	05	406673	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK NEGARA SUNGAI RAYA	5,290,844,000	5,119,292,902		171,551,098	96.76%
32	06	409145	KANIM KELAS II SANGGAU	7,407,726,000	7,160,644,596		247,081,404	96.66%
33	11	686574	KANIM KELAS III PUTUSIBAU	5,067,500,000	4,876,438,504		191,061,496	96.23%
34	05	497789	RUMAH TAHANAN NEGARA BENGKAYANG	4,694,061,000	4,461,278,116		232,782,884	95.04%
35	05	632031	BAPAS SAMBAS	2,559,609,000	2,204,541,248		355,067,752	86.13%
36	05	409139	BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK	12,835,589,000	10,973,424,302		1,862,164,698	85.49%
TOTAL				244,995,143,000	238,915,884,071		6,079,258,929	97.52%

KETERANGAN KODE ESELON (WARNA) :	
01	SEKRETARIAT JENDERAL
03	DITJEN AHU
05	DITJEN PEMASYARAKATAN
06	DITJEN IMIGRASI
07	DITJEN HKI
08	DITJEN PP
09	DITJEN HAM
10	BPHN
11	BALITBANG HAM

TANGGAL / JAM CETAK OMSPAN : 31.12.2022 / 08.30 WIB

FILTER : JAN-DESEMBER 2022

INDIKATOR WARNA PENYERAPAN ANGGARAN (%)	
	> 97 %
	70 S.D 96.99%
	< 70 %

No.	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	406673	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGKAWANG	99,88	99,51	99,61	100	20	100
2	408190	KANTOR IMIGRASI SAMPAS	99,87	99,43	99,59	100	20	100
3	406658	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KETAPANG	99,83	98,58	99,83	100	20	100
4	408834	DITJEN PAS KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	99,74	98,5	99,35	100	20	100
5	406664	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PONTIANAK	99,7	98,91	98,92	100	20	100
6	662967	KANTOR IMIGRASI ENTIKONG	99,48	97,63	98,39	100	20	100
7	418936	RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK	99,35	97,82	99,02	100	19,64	99,09
8	406642	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BENGKAYANG	99,28	95,04	98,66	100	20	100
9	409145	KANTOR IMIGRASI PUTUSSIBAU	99,05	96,23	96,78	100	20	100
10	653395	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA KELAS II SANGGAU	98,92	97,02	99,48	100	19,03	97,58
11	408835	KANTOR IMIGRASI PONTIANAK	98,68	97,06	98,06	100	19,05	97,63
12	408833	DITJEN AHU KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	98,43	99,58	91,61	100	20	100
13	526822	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA KELAS I PONTIANAK	98,35	97,51	95,54	100	19,16	97,9
14	632637	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA KELAS II SINGKAWANG	98,08	99,39	99,95	100	17,41	93,52
15	409139	BALAI PEMASYARAKATAN SINTANG	97,85	96,78	89,93	100	20	100
16	408171	KANTOR IMIGRASI SINGKAWANG	97,63	97,89	98,83	100	17,26	93,16
17	497773	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SANGGAU	97,54	99,58	99,07	100	16,85	92,12
18	406611	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PUTUSSIBAU	97,47	97,7	99,43	100	16,92	92,29
19	408830	SEKJEN KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	96,73	100,17	99,84	100	15,45	88,62
20	408838	DITJEN HAM KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	96,63	99,9	82,61	100	19,72	99,31
21	686574	KANTOR IMIGRASI KETAPANG	96,38	97,15	95,5	100	16,47	91,18
22	406633	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMPAS	96,19	98,7	79,78	100	20	100
23	539101	KANTOR IMIGRASI SANGGAU	96,08	96,66	98,45	100	15,37	88,43
24	406627	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINTANG	95,7	98,56	99,59	100	14,29	85,73
25	408839	BPHN KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	95,25	99,68	88,25	100	16,4	90,99
26	408836	DITJEN KI KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	94,76	99,37	99,9	100	12,77	81,94
27	408837	DITJEN PP KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	94,46	99,98	69,56	100	20	100
28	653403	BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK	94,24	85,56	97,76	100	14,47	86,17
29	408840	BALITBANGHAM KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	94,16	99,96	67,96	100	20	100
30	406602	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK	93,41	97,87	97,98	100	11,58	78,96
31	497789	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB LANDAK	93,41	97,51	98,56	100	11,49	78,72
32	408834	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PONTIANAK	92,55	99,92	95,68	100	10,69	76,74
33	567873	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MEMPAWAH	91,17	99,91	87,88	100	10,75	76,87
34	408835	DITJEN IM KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR	90,92	98,95	99,36	100	7,61	69,01
35	622441	BALAI PEMASYARAKATAN SAMPAS	90,73	86,13	97,25	96,65	11,65	79,13
36	418336	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PONTIANAK	86,89	97,9	99,73	100	17,54	93,85

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN											
*Data ditarik tanggal 5 Januari 2023											
No	Kode Satker	Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
1	409139	BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK	100	62,43	73,17	80,00	100	97,21	100	100	88,60
2	632031	BALAI PEMASYARAKATAN SAMBAS	100	66,38	90,06	100,00	100	99,67	100	100	94,62
3	622441	BALAI PEMASYARAKATAN SINTANG	100	63,38	99,62	0	0	100	100	100	95,33
4	408171	KANIM KELAS I PONTIANAK	100	85,03	88	89,73	100	100	100	100	95,06
5	539101	KANIM KELAS II ENTIKONG	100	94,93	100	95	100	99,73	100	100	98,97
6	662967	KANIM KELAS II SAMBAS	100	83,84	99	98	100	99,45	100	100	97,97
7	409145	KANIM KELAS II SANGGAU	100	75,47	99,69	100	100	100	100	100	97,49
8	408190	KANIM KELAS II SINGKAWANG	100	81,76	95,33	87,14	100	97,55	100	100	95,71
9	418936	KANIM KELAS III KETAPANG	100	77,19	98,92	93,25	100	98,67	100	100	96,70
10	686574	KANIM KELAS III PUTUSSIBAU	100	92,7	94,01	91	100	99,92	100	100	97,16
11	408840	KANTOR WILAYAH (BALITBANG HAM)	100	76,63	100	0	0	84,60	100	100	95,15
12	408839	KANTOR WILAYAH (BPHN)	100	78,50	99,4	0	0	88,25	100	100	95,69
13	408833	KANTOR WILAYAH (DITJEN AHU)	100	100	99,59	100	100	0	100	100	99,91
14	408836	KANTOR WILAYAH (DITJEN HAKI)	100	100	99,26	0	0	0	100	100	99,79
15	408835	KANTOR WILAYAH (DITJEN IMIGRASI)	100	84,21	90,88	0	0	0	100	100	95,14
16	408834	KANTOR WILAYAH (DITJEN PEMASYARAKATAN)	100	77,87	93,44	0	0	93,61	100	100	94,79
17	408838	KANTOR WILAYAH (DITJEN PERLINDUNGAN HAM)	100	79,33	87,24	0	0	95,56	100	100	93,67
18	408837	KANTOR WILAYAH (DITJEN PP)	100	63,53	100	0	0	95,82	100	100	94,92
19	408830	KANTOR WILAYAH (SEKJEN)	100	89,17	100,00	100,00	100	95,55	100	100	98,47
20	418336	LAPAS PEREMPUAN PONTIANAK	100	81,03	99,49	71,43	100	97,59	100	100	94,90
21	406664	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KETAPANG	100	90,14	100	100,00	100	99,56	100	100	98,97
22	406602	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PONTIANAK	100	91,24	99,45	83,81	100	99,35	100	100	97,33
23	406627	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGKAWANG	100	94,71	100	100	100	99,80	100	100	99,45
24	406658	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINTANG	100	100	97,98	100	100	100	100	100	99,60
25	406673	LPKA SUNGAI RAYA	100	83,68	99,56	71,43	100	99,95	100	100	95,42
26	664650	RUDENIM PONTIANAK	100	76,65	99,22	91,00	100	100	100	100	96,60
27	497789	RUMAH TAHANAN BENGKAYANG	100	75,92	100	71,43	92,31	96,74	100	100	93,64
28	497773	RUMAH TAHANAN NEGARA LANDAK	100	70,76	100	100	100	99,88	100	100	97,06
29	406633	RUMAH TAHANAN NEGARA MEMPAWAH	100	75,02	100	85,71	100	92,50	100	100	95,32
30	406642	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMBAS	100	88,36	89,76	100	100	100	100	100	96,79
31	406611	RUMAH TAHANAN NEGARA SANGGAU	100	94,19	98,17	100	100	100,00	100	100	99,05
32	567873	RUMAH TAHANAN PONTIANAK	100	91,44	98,42	81,43	100	98,31	100	100	96,80
33	526822	RUMAH TAHANAN PUTUSSIBAU	100	83,83	93,90	80,00	100	85,03	100	100	93,67
34	632637	RUPBASAN PONTIANAK	100	85,44	100	0	100	100	100	100	88,54
35	653403	RUPBASAN SANGGAU	100	78,81	100	0	0	99,87	100	100	97,34
36	653395	RUPBASAN SINGKAWANG	100	67,26	98,89	100	100	99,28	100	100	96,43
RATA-RATA NILAI IKPA			100	82,25	96,74	91,17	99,72	89,26	100,00	100	96,17



Alamat Kami :

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kantor Wilayah Kalimantan Barat
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang**

**Jalan Firdaus H. Rais A. Rachman No.31, Pasiran,
Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang,
Kalimantan Barat 79122**

**Telepon : (0562) 631946, Faksimile : (0562) 633445
Laman: <http://kanimsingkawang.kemenkumham.go.id/>,
Surel: knm.singkawang@kemenkumham.go.id**